





**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/ 275 /2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/474/2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025**

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada rencana kerja perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2./474/2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
12. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2./474/2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

- KEDUA** : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025;
- KETIGA** : Sistematisa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** yaitu sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN;
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
BAB IV : PENUTUP.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 8 Juli 2025



BUPATI SERUYAN,

AHMAD SELANORWANDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/ 275 /2025
TANGGAL 9 Juli 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2./474/2024 TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025

DARTAR PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH	
NO	
1	2
1	Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seruyan
8	Dinas Sosial Kabupaten Seruyan
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan

PERANGKAT DAERAH

NO	
1	2
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan
15	Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan
21	Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan
22	Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan

PERANGKAT DAERAH	
NO	
1	2
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan
26	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan
28	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
30	Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan
31	Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan
32	Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan
33	Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan
34	Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan
35	Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan

PERANGKAT DAERAH	
NO	
1	2
36	Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan
37	Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan
38	Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan
39	Kecamatan Suling Tambun Kabupaten Seruyan

BUPATI SERUYAN,



[Handwritten signature]

AHMAD SELANORWANDA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2025 yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merencanakan, merumuskan, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan teknis dibidang lingkungan. Atas dasar ini Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029.

Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2025 menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan perubahan program kegiatan dan Anggaran dalam bentuk RKA serta Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2025. Tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini. Kami sadar bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini, oleh karena itu masukan serta saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna kesempurnaan penyusunannya di masa mendatang.

Kuala Pembuang, 10 Juli 2025

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Kabupaten Seruyan,



AGUNG SULISTYONO, S.H., MSM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19710427 199103 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan	I-5
1.4. Sistematika Tulisan	I-6
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN	
TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN	II-1
2.1. Evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sampai	
Dengan Triwulan I Tahun Berkenaan ...	II-2
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN	
HIDUP DAN KEHUTANAN	III-1
BAB IV. PENUTUP	IV-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan Tahun 2025 menjabarkan visi dan misi serta arah pembangunan di bidang Lingkungan yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029 serta disusun dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan Tahun 2025 ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah.
- b. Pergeseran pagu kegiatan, penambahan atau pengurangan pagu kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,

- Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

- Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 34);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6,

- Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045;
 17. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10);
 18. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 13);
 19. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 13);
 20. Peraturan Bupati Seruyan Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor ...;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari dibuatnya Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan Tahun 2025 adalah Sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan maupun anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan Tahun 2025 sebagai penjabaran dari Renstra Tahun 2025-2029 pada triwulan ke 2 (dua) Tahun Berjalan;

Tujuan dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-

RENJA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan Tahun 2025, yaitu :

- a. Untuk Menyediakan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan yang tersusun secara Prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan dalam satu tahun;
- b. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah;
- c. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- d. Menjaga kontinuitas, kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan Daerah;
- e. Mengakomodir perubahan-perubahan berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan Tahun 2025 terdiri dari 4 bab dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

I.2 Landasan Hukum

I.3 Maksud dan Tujuan

I.4 Sistematika Tulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenaan

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan I tahun 2025 Berikut Tabel 2.1 mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan, berapa persen target kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 s/d 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Reralisasi Kinerja pada triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
								I				II				III				IV						14=7+13			15=(14/6)*100										
1	2	3			4	5	6			7			8			9			10			11			12			13			14=7+13			15=(14/6)*100		16			
						K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp				
	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	2	11	01																																			
		2	11	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																																	
		2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36	Laporan	8.000.000	12	Laporan	2.500.000	12	Laporan	2.500.000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	12	Laporan	2.500.000	33,33	31,25			
		2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																																
		2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1008	Orang/ Bulan	11.763.487.265	26	Orang/Bulan	3.673.701.886	336	Orang/Bulan	4.573.874.005	78	Orang/ Bulan	408.572.300	0	Orang /Bulan	0	0	Orang /Bulan	0	0	Orang /Bulan	0	0	Orang /Bulan	0	78	Orang/ Bulan	408.572.300	104	Orang/ Bulan	4.082.274.186	10,32	34,70
		2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																																
		2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaiannya	9	Paket	225.000.000	3	Paket	49.783.500	3	Paket	114.000.000	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	3	Paket	49.783.500	33,33	22,13
		2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	30	Orang	480.000.000	10	Orang	12.358.180	10	Orang	-	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	0	10	Orang	12.358.180	33,33	2,57
		2	11	01	2.05	11	Bimbingan Teknis	30	Orang	695.000.000	10	Orang	169.220.965	10	Orang	165.610.000	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	0	10	Orang	169.220.965	33,33	24,35
		2	11	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																																
		2	11	1	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	39	Paket	184.599.958	13	Paket	30.820.000	13	Paket	4.334.250	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	13	Paket	30.820.000	33,33	16,70
		2	11	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	51	Paket	663.969.727	17	Paket	68.126.500	17	Paket	-	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	17	Paket	68.126.500	33,33	10,26
		2	11	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	298.155.000	4	Paket	86.055.000	4	Paket	51.800.000	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	4	Paket	86.055.000	33,33	28,86
		2	11	1	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	18	Paket	295.475.000	6	Paket	69.500.000	2	P																								

			2	11	1	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	15	Unit	138.482.000	5	Unit	56.400.000	5	Unit	717.102.000	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	5	Unit	56.400.000	33,33	40,73		
			2	11	1	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15	Unit	552.876.851	5	Unit	153.690.600	5	Unit	56.337.000	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	5	Unit	153.690.600	33,33	27,80		
			2	11	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum																															
			2	11	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	Laporan	131.090.979	1	Laporan	34.900.000	1	Laporan	14.993.000	0,25	Laporan	3.500.000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0,25	Laporan	3500000	1,25	Laporan	38.400.000	41,67	29,29		
			2	11	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	Laporan	533.426.930	1	Laporan	84.807.172	1	Laporan	171.346.260	0,25	Laporan	15.218.602	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0,25	Laporan	15218602	1,25	Laporan	100.025.774	41,67	18,75		
			2	11	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	Laporan	439.433.000	1	Laporan	78.867.500	1	Laporan	10.815.850	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	1	Laporan	78.867.500	33,33	17,95		
			2	11	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Laporan	2.643.091.161	1	Laporan	773.608.300	1	Laporan	669.542.400	0,25	Bulan	86.892.670	0	Bulan	0	0	Bulan	0	0	Bulan	0	0,25	Laporan	86892670	1,25	Laporan	860.500.970	41,67	32,56		
			2	11	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah																															
			2	11	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dihayarkan Pakainya	42	Unit	879.460.172	14	Unit	157.386.700	14	Unit	388.094.552	1	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	1	Unit	0	15	Unit	157.386.700	35,71	17,90		
			2	11	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	Unit	358.328.486	8	Unit	5.525.000	8	Unit	14.750.000	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	8	Unit	5.525.000	33,33	1,54		
			2	11	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	1.661.126.988	1	Unit	234.155.000	1	Unit	31.920.000	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	1	Unit	234.155.000	33,33	14,10		
			2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Terintegrasinya RPP-LH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota																				0	0	0									
			2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup/RPP-LH																															
			2	11	2	2.01	03	Penetapan RPP-LH Kabupaten/Kota	Dokumen RPP-LH Kabupaten/Kota yang di tetapkan	3	Dokumen	100.000.000	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	-	33,33	0,00		
			2	11	2	2.01	06	Penyusunan PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPP-LH kabupaten/kota	3	Dokumen	100.000.000	1	Dokumen	-	1	Dokumen	334.120.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	-	33,33	0,00		
			2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup/RPP-LH																															
			2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPPD/RPMD dan Seuai RPPD/RPMD dan perubahannya yang disusun	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Seuai RPPD/RPMD dan perubahannya yang disusun	1	Dokumen	262.000.000	0,3	Dokumen	57.665.358	0,3	Dokumen	-	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0,33333333	Dokumen	57.665.358	33,33	22,01		
			2	11	03			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Hasil pengukuran indeks kualitas air hasil pengukuran indeks kualitas udara indeks kualitas lingkungan hidup																															
			2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah aksi pemantauan jumlah rencana aksi pencegahan pencemaran dan/ atau kerusakan LH kabupaten																															

[illegible]

[illegible]

	2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Ditilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	30	Entitas	33.278.740	10	Entitas	7.417.900	10	Entitas	8.857.000	0	Entitas	0	0	Entitas	0	0	Entitas	0	0	Entitas	0	0	Entitas	0	10	Entitas	7.417.900	33,33	22,29	
	2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan yang dilaporkan																														
	2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Penyelesaian Pengaduan LH Bidang PPLH Kabupaten																														
	2	11	10	2.01	04	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditawar	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditawar	15	Pengaduan	83.000.236	5	Pengaduan	-	5	Pengaduan	46.188.000	0	Pengaduan	0	0	Pengaduan	0	0	Pengaduan	0	0	Pengaduan	0	0	Pengaduan	0	5	Pengaduan	-	33,33	0,00	
	2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah, Persentase timbulan sampah yang ditangani dan Operationalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten																														
	2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah dan Persentase Cakupan Area Pelayanan																														
	2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	3	Dokumen	178.219.852	1	Dokumen	52.059.960	1	Dokumen	-	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	52.059.960	33,33	29,21	
	2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	15	Unit	1.878.870.740	5	Unit	273.200.000	5	Unit	222.767.200	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	5	Unit	273.200.000	33,33	14,54	
	2	11	11	2.01	08	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan disetujui	3	Dokumen	39.723.310	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	-	33,33	0,00	
	2	11	11	2.01	012	Pengangkutan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	128775	Ton	17.351.241.813	42925	Ton	5.317.170.450	42925	Ton	5.078.576.000	10581	Ton	713.254.000	0	Ton	0	0	Ton	0	0	Ton	0	10581	Ton	713.254.000	53506	Ton	6.030.424.450	41,55	34,76	
	3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Rehabilitasi TAHURA dan Kerusakan kawasan TAHURA																														
	3	28	04	2.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Persentase Tahura yang dikelola dengan baik																														
	3	28	04	2.01	05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Areal TAHURA yang Dilakukan Pemulihan Sesuai Rencana Ekosistem	13305	Ha	3.000.000	4435	Ha	-	4435	Ha	-	0	Ha	0	0	Ha	0	0	Ha	0	0	Ha	0	0	Ha	0	4435	Ha	-	33,33	0,00	

			2	28	04	2.10	10	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	3	Dokumen	20.000.000	1	Dokumen	-	1	Dokumen	-	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	-	33,33	0,00																									
			3	28	04	2.01	11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (jangka Panjang dan jangka Pendek) yang Disusun dan Disetujui	3	Dokumen	52.000.000	1	Dokumen	-	1	Dokumen	1.980.854.000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	-	33,33	0,00																									
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																														245	1	4,09	0	-	0	-	0	-	240,06	1254803272	1338,02	-	472085130	34,62																			
Predikat Kinerja																														SAT TINGGI	RENDAH		RENDAH			RENDAH	RENDAH		RENDAH			SANGAT TINGGI		SANGAT TINGGI		SANGAT TINGGI	RENDAH																
Faktor pendorong keberhasilan Kinerja																																																															
Faktor penghambat pencapaian kinerja																																																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) :																																																															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam renja perangkat daerah kabupaten/kota berikutnya *) :																																																															

*) Diisi oleh kepala Bappeda

Kuala Pembuang, 10 Juli 2025
BUDYONO, SH., MSM
NIP. 199103 1 002

Dievaluasi
Kuala Pembuang, Maret 2025

BUDI PURWANTO,SP., Msi
NIP. 19670909 199509 1 001

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Untuk mengetahui sejauh mana rencana kerja dan pendanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan, Berikut Tabel Perubahan RKPD dan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan Tahun 2025 dan Prakiraan maju Tahun 2025 mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan sebagai berikut :

Adapun untuk pagu program yang berubah sebanyak 3 (tiga) program yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada pagu murni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sebesar Rp. 7.863.496.466,00 setelah perubahan pagu berkurang menjadi Rp. 7.182.765.297,00;

b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Pada pagu murni Program Perencanaan Lingkungan Hidup Sebesar Rp. 174.998.100,00 setelah perubahan pagu berkurang menjadi Rp. 172.800.000,00;

c. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Pada pagu murni Program Pengendalian dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Sebesar Rp. 247.752.484,00 setelah perubahan pagu berkurang menjadi Rp. 107.739.000,00;

d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Pada pagu murni Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Sebesar Rp. 75.000.000,00 setelah perubahan pagu bertambah menjadi Rp. 4.852.570.420,00;

e. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Pada pagu murni Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun

(B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Sebesar Rp. 96.625.000,00 setelah perubahan pagu berkurang menjadi Rp. 35.913.000,00;

f. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Pada pagu murni Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Sebesar Rp. 98.870.000,00 setelah perubahan pagu berkurang menjadi Rp. 64.975.000,00;

g. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH

Pada pagu murni Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH Sebesar Rp. 37.645.000,00 setelah perubahan pagu berkurang menjadi Rp. 37.600.000,00;

h. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Adapun pagu murni Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Sebesar Rp. 46.353.350,00 setelah perubahan pagu bertambah menjadi Rp. 5.120.817.600,00;

i. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Pada pagu murni Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Sebesar Rp. 11.019.000,00 setelah perubahan pagu berkurang menjadi Rp. 8.857.000,00;

j. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Pada pagu murni Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Sebesar Rp. 27.578.000,00 setelah perubahan pagu bertambah menjadi Rp. 46.180.000,00;

k. Program Pengelolaan Persampahan

Pada pagu murni Program Pengelolaan Persampahan Sebesar Rp. 6.475.121.600,00 setelah perubahan pagu bertambah menjadi Rp.

6.905.263.200,00;

1. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Adapun pagu murni Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Sebesar Rp. 31.910.000,00 setelah perubahan pagu bertambah menjadi Rp. 2.145.464.000,00.

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KAB. SERUYAN TAHUN 2025																					
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN								15.186.369.000,00	25.743.170.517,00	26.680.944.517,00	11.494.575.517,00							15.883.004.390,30	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.154.459.000,00	23.762.316.517,00	24.535.480.517,00	9.381.021.517,00							15.840.904.390,30		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							15.154.459.000,00	23.762.316.517,00	24.535.480.517,00	9.381.021.517,00							15.840.904.390,30		
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE UNIT KERJA YANG M ENDAPATKAN PELAYANAN ADM INISTRASI PERKANTORAN (%)				100 Persen	100 Persen	7.863.496.466,00	7.511.380.317,00	7.182.765.297,00	531.314.119,30							8.394.810.585,30		
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00			-	- -	-		3.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			3.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				336 Orang / Bulan	336 Orang / Bulan	4.066.415.206,00	4.573.874.005,00	4.723.732.452,35	657.317.246,35			-	- -	-		4.091.142.103,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				336 Orang/ bulan	336 Orang/ bulan	4.066.415.206,00	4.573.874.005,00	4.723.732.452,35	657.317.246,35	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	- -			4.091.142.103,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	430.975.000,00	279.610.000,00	53.250.000,00	-377.725.000,00			-	- -	-		575.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	81.150.000,00	114.000.000,00	53.250.000,00	-27.900.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	149.970.000,00	0,00	0,00	-149.970.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	199.855.000,00	165.610.000,00	0,00	-199.855.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang diadakan				100 Persen	100 Persen	857.807.350,00	580.495.250,00	344.892.250,00	-512.915.100,00			-	- -	-		1.272.014.221,88	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	39.353.700,00	4.334.250,00	4.334.250,00	-35.019.450,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			76.849.978,75	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	96.277.800,00	0,00	0,00	-96.277.800,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			270.164.243,13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	105.207.850,00	51.800.000,00	65.333.000,00	-39.874.850,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	102.004.000,00	59.630.000,00	41.710.000,00	-60.294.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	14.994.000,00	9.996.000,00	9.996.000,00	-4.998.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				23 Laporan	23 Laporan	499.970.000,00	454.735.000,00	223.519.000,00	-276.451.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			650.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksanannya Pengadaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	212.058.000,00	773.439.000,00	748.552.800,00	536.494.800,00			-	- -	-		250.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	62.058.000,00	717.102.000,00	717.102.000,00	655.044.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	150.000.000,00	56.337.000,00	31.450.800,00	-118.549.200,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.249.603.410,00	866.697.510,00	964.718.242,65	-284.885.167,35			-	- -	-		1.382.892.653,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	41.096.000,00	14.993.000,00	14.993.000,00	-26.103.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	171.346.260,00	171.346.260,00	121.394.992,65	-49.951.267,35	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	89.386.750,00	10.815.850,00	30.735.850,00	-58.650.900,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			180.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	947.774.400,00	669.542.400,00	797.594.400,00	-150.180.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			947.892.653,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah				9 Unit	9 Unit	1.044.137.500,00	434.764.552,00	345.119.552,00	-699.017.948,00			-	- -	-		820.761.607,42	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	293.082.500,00	388.094.552,00	278.694.552,00	-14.387.948,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			290.925.470,13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	8 Unit	160.000.000,00	14.750.000,00	14.630.000,00	-145.370.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			160.164.243,13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	591.055.000,00	31.920.000,00	51.795.000,00	-539.260.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			369.671.894,16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota (Rumus Jumlah seluruh dokumen Rencana LH yang tersusun dibagi Jumlah seluruh dokumen rencana LH yang seharusnya disusun x 100%)				1 Dokumen	1 Dokumen	174.998.100,00	334.120.000,00	172.800.000,00	1.900,00							175.000.000,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)				1 Dokumen	1 Dokumen	74.999.500,00	334.120.000,00	172.800.000,00	97.800.500,00			-	- -	-		75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	24.999.500,00	0,00	0,00	-24.999.500,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	-	- -			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	334.120.000,00	172.800.000,00	122.800.000,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	99.998.600,00	0,00	0,00	-99.998.600,00			-	- -	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																		
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	99.998.600,00	0,00	0,00	-99.998.600,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah Lokasi Pemantauan				6 Lokasi	6 Lokasi	247.752.484,00	179.218.000,00	107.739.000,00	5.880.656,00							253.633.140,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2 Dokumen	2 Dokumen	185.420.484,00	165.458.000,00	93.979.000,00	-91.441.484,00			-	- -	-		188.316.731,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2 Dokumen	2 Dokumen	128.841.000,00	165.458.000,00	93.979.000,00	-34.862.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PAJAK AIR TANAH DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			131.736.859,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	56.579.484,00	0,00	0,00	-56.579.484,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir Timur, Kartika Bhakti	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) PAJAK AIR TANAH	-	- -			56.579.872,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	62.332.000,00	13.760.000,00	13.760.000,00	-48.572.000,00			-	- -	-		65.316.409,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.2.03.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	30.252.000,00	6.680.000,00	6.680.000,00	-23.572.000,00	Kab. Seruyan, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			33.280.324,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.2.03.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	7.080.000,00	7.080.000,00	7.080.000,00	0,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			7.036.085,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Lahan Keanekaragaman Hayati yang terkelola (Rumus : Jumlah Lokasi penanaman Tanaman keanekaragaman hayati dibagi Jumlah Lokasi yang ditetapkan Menteri LHK x 100%)				80 Persen	80 Persen	75.000.000,00	5.017.180.400,00	4.852.570.420,00	0,00							75.000.000,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	5.017.180.400,00	4.852.570.420,00	4.777.570.420,00			-	- -	-		75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Ha	150 Ha	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			25.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan																		
			Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	5.017.180.400,00	4.852.570.420,00	4.802.570.420,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	- -			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang diawasi				80 Persen	80 Persen	96.625.000,00	75.670.000,00	35.913.000,00	3.375.000,00							100.000.000,00	
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				5 Dokumen	5 Dokumen	96.625.000,00	75.670.000,00	35.913.000,00	-60.712.000,00			-	- -	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.05.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				5 Dokumen	5 Dokumen	96.625.000,00	75.670.000,00	35.913.000,00	-60.712.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap ijin lingkungan, IzinPPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemkab				30 Persen	30 Persen	98.870.000,00	129.950.000,00	64.975.000,00	1.130.000,00							100.000.000,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				21 Badan Usaha	21 Badan Usaha	98.870.000,00	129.950.000,00	64.975.000,00	-33.895.000,00			-	- -	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				21 Badan Usaha	21 Badan Usaha	98.870.000,00	129.950.000,00	64.975.000,00	-33.895.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
7.	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terfasilitasi pendampingan pengakuan M HA (rumus : Jumlah M HA yang diakui)				1 Lembaga	1 Lembaga	37.645.000,00	37.600.000,00	37.600.000,00	24.016.804,00							61.661.804,00	
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLHatau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait				1 Dokumen	1 Dokumen	37.645.000,00	37.600.000,00	37.600.000,00	-45.000,00			-	- -	-		38.372.804,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				1 Dokumen	1 Dokumen	37.645.000,00	37.600.000,00	37.600.000,00	-45.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			38.372.804,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan,Pendampingan dan Penguatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		23.289.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH																		
			Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			23.289.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
8.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang menjadi kader lingkungan hidup (rumus : Jumlah masyarakat yang menjadi kader LH dibagi jumlah M asyarakat yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH x 100%				100 Persen	100 Persen	46.353.350,00	5.120.817.600,00	5.120.817.600,00	629.274,00							46.982.624,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	46.353.350,00	5.120.817.600,00	5.120.817.600,00	5.074.464.250,00			-	- -	-		46.982.624,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	22.628.350,00	5.106.137.600,00	5.106.137.600,00	5.083.509.250,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	- -			24.092.924,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																		
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				5 Lembaga	5 Lembaga	23.725.000,00	14.680.000,00	14.680.000,00	-9.045.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	- -			22.889.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
9.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup (Rumus : ada/tidak ada				ada/tidak ada Ada/Tidak Ada	ada/tidak ada Ada/Tidak Ada	11.019.000,00	8.857.000,00	8.857.000,00	1.146.340,00							12.165.340,00	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				10 Entitas	10 Entitas	11.019.000,00	8.857.000,00	8.857.000,00	-2.162.000,00			-	- -	-		12.165.340,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																		
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				10 Entitas	10 Entitas	11.019.000,00	8.857.000,00	8.857.000,00	-2.162.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			12.165.340,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025		APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025	NASIONAL					DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
10.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Penyelesaian Pengaduan yang dilaporkan (rumus : pengaduan masyarakat yang ditangani dibagi total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi x 100%)				100 Persen	100 Persen	27.578.000,00	46.180.000,00	46.180.000,00	2.763.476,00							30.341.476,00				
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				5 Pengaduan	5 Pengaduan	27.578.000,00	46.180.000,00	46.180.000,00	18.602.000,00			-	- -	-		30.341.476,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																					
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				5 Pengaduan	5 Pengaduan	27.578.000,00	46.180.000,00	46.180.000,00	18.602.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			30.341.476,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
11.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten (Nilai TPA (Program Adipura) > 71) Persentase Penanganan Sampah				1 50 Operasio nalisasi TP Persen	1 50 Operasio nalisasi TP Persen	6.475.121.600,00	5.301.343.200,00	6.905.263.200,00	116.187.821,00							6.591.309.421,00				
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untukPengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokumen	1 Dokumen	6.475.121.600,00	5.301.343.200,00	6.905.263.200,00	430.141.600,00			-	- -	-		6.591.309.421,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																					
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokumen	1 Dokumen	60.180.000,00	0,00	0,00	-60.180.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			63.246.532,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota																					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				5 Unit	5 Unit	614.750.000,00	222.767.200,00	948.443.200,00	333.693.200,00	Kab. Seruyan, Seruyan Hilir, Kuala Pembuang II	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			686.288.250,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota																					
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	13.200.200,00	0,00	0,00	-13.200.200,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			14.521.210,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																					
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				42925 Ton	42925 Ton	5.786.991.400,00	5.078.576.000,00	5.956.820.000,00	169.828.600,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			5.827.253.429,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							31.910.000,00	1.980.854.000,00	2.145.464.000,00	2.113.554.000,00							42.100.000,00				
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							31.910.000,00	1.980.854.000,00	2.145.464.000,00	2.113.554.000,00							42.100.000,00				
1.	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Rehabilitasi TAHURA (Rumus : Persentase luas TAHURA dan yang direhabilitasi dibagi luas total TAHURA x 100%)				80 Persen	80 Persen	31.910.000,00	1.980.854.000,00	2.145.464.000,00	10.190.000,00							42.100.000,00				
	3.28.04.2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Tahura yang dikelola				4435 Hektar	4435 Hektar	31.910.000,00	1.980.854.000,00	2.145.464.000,00	2.113.554.000,00			-	- -	-		42.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
	3.28.04.2.01.0007	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota																					
			Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Seruyan, Hanau, Bahaur	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
	3.28.04.2.01.0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA																					
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.980.854.000,00	2.145.464.000,00	2.145.464.000,00	Kab. Seruyan, Hanau, Bahaur	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH SDA KEHU TANAN-DANA REBOISASI (DR)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
	3.28.04.2.01.0015	Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota																					
			Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem				4435 Ha	4435 Ha	31.910.000,00	0,00	0,00	-31.910.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			42.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN			
		J U M L A H																				15.883.004.390,30	

Adapun Program DLHK yang mendukung prioritas Kepala Daerah sesuai janji politik Peningkatan pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu ada 2 (dua) Program sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kesusakan Lingkungan Hidup;

2. Program Pengelolaan Persampahan.

BAB IV PENUTUP

Semua Program Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan target yang diinginkan akan tercapai apabila kegiatan Prioritas dianggarkan dan tersedia dana yang cukup, akan tetapi sebaliknya seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan terlaksana dengan baik sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan akan berpedoman pada kaidah-kaidah yang sudah ada yaitu RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Provinsi, RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, DPA Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan.

Untuk tindak lanjut dalam penyusunan Perubahan Renja (P-RENJA) ini selanjutnya kami akan menyusun Perubahan Program Kegiatan dan Anggaran dalam bentuk RKAP serta Perubahan Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2025. Demikian Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2025 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.

